



Volume 9 Nomor 2 (2022) Halaman 220-230  
**Tumbuh kembang : Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD**  
**Jurnal PG-PAUD FKIP Universitas Sriwijaya**



Website :

<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/tumbuhkembang/index>

Email : [jtk@fkip.unsri.ac.id](mailto:jtk@fkip.unsri.ac.id)

pISSN : 2355-7443 eISSN:2657-0785

## Evaluasi Program CIPP Pulau Layak Anak di Pulau Hiri

**Radjiman Ismail<sup>1</sup>, Nurfitri Sahidun<sup>2✉</sup>, Rinelsa R. Husain<sup>3</sup>, Ririn Duwila<sup>4</sup>, Hatija Ngongira<sup>5</sup>**

<sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup> Program Studi Pendidikan Islam Pendidikan Anak Usia Dini, IAIN Ternate

DOI: <http://doi.org/10.36706/jtk.v9i2.18759>

Received 06/11/2022, Accepted 22/11/2022, Published 30/11/2022

### ABSTRAK

Peresmian Pulau Layak Anak di Pulau Hiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap salah satu pulau yang ada di kawasan Indonesia Timur dimana semua peran pemerintah harus memberikan dampak besar bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di Pulau Hiri, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis evaluasi konteks pelaksanaan pulau layak anak di pulau hiri, mendeskripsikan evaluasi input pelaksanaan pulau layak anak di pulau Hiri, mendeskripsikan evaluasi proses pelaksanaan pulau layak anak di Pulau Hiri serta mendeskripsikan evaluasi produk pelaksanaan pulau layak anak di Pulau Hiri. Metode yang digunakan adalah metode evaluasi program CIPP. Hasil penelitian ini menjelaskan: 1) Penyusunan kebijakan dan anggaran yang sudah melibatkan anak agar perlu disosialisasikan lagi ke seluruh masyarakat yang ada di Pulau Hiri, 2). Pemenuhan dan hak perlindungan anak agar ditingkatkan lagi dengan melibatkan berbagai LSM ataupun mitra lainnya, 3). Perencanaan kegiatan dan pembangunan yang telah melibatkan suara dan aspirasi anak agar dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama-sama agar seluruh sarana dan prasarana sesuai dengan program pulau layak anak, 4). Para Pendidik, orang tua, dan seluruh *stakeholder* agar bersama-sama mencetak generasi-generasi emas yang ada di Pulau Hiri.

**Kata Kunci:** *Evaluasi Program CIPP, Pulau Layak Anak*

### ABSTRACT

The inauguration of a Child Friendly Island on Hiri Island by the Minister of Women's Empowerment and Child Protection is a form of appreciation for one of the islands in Eastern Indonesia where all government roles must have a major impact on the fulfillment of children's rights and protection, especially on Hiri Island, Ternate City, and North Maluku Province. The purpose of the study was to analyze the evaluation of the context of implementing a child-friendly island on Hiri Island, describe the evaluation of inputs for the implementation of a child-friendly island on Hiri Island, describe the evaluation of the process of implementing a child-friendly island on Hiri Island and describe the product evaluation of the implementation of a child-friendly island on Hiri Island. The method used is the CIPP program evaluation method. The results of this study explain: 1) Formulating policies and budgets that have involved children so that they need to be socialized again to all communities on Hiri Island, 2). Fulfillment and child protection rights to be improved again by involving various non-governmental organization or other partners, 3). Planning

activities and development that have involved the voices and aspirations of children to be implemented and evaluated together so that all facilities and infrastructure are in accordance with the child-friendly island program, 4). Educators, parents, and all stakeholders to work together to create golden generations on Hiri Island.

**Keywords:** *CIPP Program Evaluation, Child Friendly Island.*

## **PENDAHULUAN**

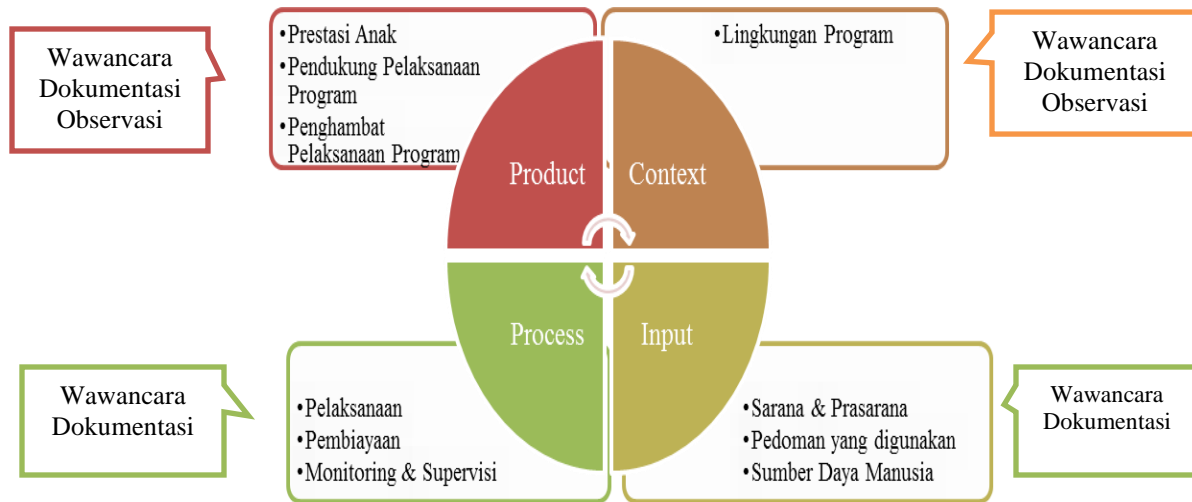
Sejak diresmikan pada tahun 2018, Pulau layak anak di Pulau Hiri merupakan satu-satunya Pulau Layak Anak yang ada di Indonesia sampai dengan sekarang. Ini merupakan sebuah momentum bagi Kota Ternate untuk dapat memotivasi kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara untuk melakukan hal yang sama. Lebih lanjut lagi, Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak dalam siaran pers (2018) menyatakan bahwa peran semua pihak mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, media massa, dunia usaha dan seluruh warga masyarakat akan berdampak besar bagi keberhasilan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.

Upaya dari pemerintah tidak akan berjalan dengan mulus tanpa bantuan dan campur tangan dari masyarakat. Perlu dorongan dan bantuan serta evaluasi dari masyarakat setempat untuk melihat sejauh mana program tersebut dilaksanakan. Banyak sekali antusias dari masyarakat Pulau Hiri terhadap program pulau layak anak tersebut. Program Pulau Layak Anak merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia, melindungi anak dan remaja agar tetap berada pada pantauan baik itu dari orangtua dan pemerintah setempat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Sejalan dengan pemenuhan hak-hak anak, anak merupakan generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Perwujudan anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pulau Layak anak membantu anak dalam segala aspek. Pulau layak anak dimaksudkan agar anak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan seluruh *stakeholder* untuk membantu memberikan hak-hak anak dan perlindungan khusus di segala sektor pemerintahan pulau layak anak tersebut.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian metode evaluasi program CIPP (*context, input, process, and product*) dengan tujuan mendapatkan segala bentuk informasi terkait dengan perkembangan program desa layak anak di Pulau Hiri. Objek dalam penelitian ini yakni bersumber dari Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Camat Pulau Hiri, 6 Kantor Lurah di Pulau Hiri, Puskesmas Pulau Hiri, PAUD dan Masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta pengumpulan data berdasarkan instrumen penelitian untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai pulau layak anak. Peneliti melakukan analisis terhadap keseluruhan temuan dalam proses upaya melakukan evaluasi program pulau layak anak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan CIPP yakni menjabarkan seluruh temuan berdasarkan konteks, input, proses dan produk. Berikut disajikan alur prosedur pengambilan data.



Gambar 1. Prosedur Pengambilan Data

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan butir-butir yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan Pulau Layak Anak.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No.	Komponen	Aspek	Indikator
1.	Konteks	Lingkungan Program	1. Latar belakang penyelenggaraan program Pulau Layak Anak 2. Tujuan Pelaksanaan Program Pulau Layak Anak 3. Izin Pelaksanaan Program Pulau Layak Anak 4. MoU dengan Instansi yang mendukung pelaksanaan program Pulau Layak Anak 5. Sasaran Pelaksanaan program Pulau Layak Anak
2.	Input	Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program Pulau Layak Anak
		Pedoman yang digunakan	Pedoman Pelaksanaan program Pulau Layak Anak
		Sumber Daya	1. DP3A 2. Gugus Tugas

		Manusia	3. Camat 4. Lurah 5. Guru 6. Dokter 7. Masyarakat 8. Anak-anak
3.	Proses	Pelaksanaan	1. DP3A menyusun perencanaan program pulau layak anak 2. DP3A melakukan pendampingan terhadap berbagai stakeholder program pulau layak anak 3. DP3A melakukan evaluasi program pulau layak anak
		Pembiayaan	Adanya Pembiayaan Pelaksanaan program pulau layak anak
		Monitoring dan Supervisi	DP3A melakukan monitoring dan supervise pelaksanaan program pulau layak anak
4.	Produk	Prestasi Anak Pulau Hiri	1. Adanya prestasi akademik Anak Pulau Hiri 2. Adanya prestasi non akademik Anak Pulau Hiri
		Pendukung Pelaksanaan Program	Pendukung Pelaksanaan Program pulau layak anak
		Penghambat Pelaksanaan Program	Penghambat Pelaksanaan Program pulau layak anak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Hiri adalah sebagai pulau layak anak yang berada di Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia, dihuni oleh penduduk lokal. Dalam pembagian administrasi Indonesia, wilayah pemukiman penduduk Hiri dibagi menjadi enam kelurahan. Luas Pulau Hiri menurut Badan Pusat Statistik (2020:7) adalah 697,84 Hektare. Ketinggian tanah di Pulau Hiri berkisar antara 0-400 meter di atas permukaan laut. Perairan Pulau Hiri ditutupi oleh ekosistem alga, terumbu karang dan lamun. Pulau Hiri menjadi pulau layak anak pertama di Indonesia sejak tahun 2018. Terwujudnya pulau layak anak tentunya dengan bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Pulau layak dimaksudkan agar semua sistem pembangunan berbasis hak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan evaluasi program Pulau Layak Anak di Pulau Hiri, berikut akan peneliti uraikan secara terperinci, sebagai berikut.

### Konteks

Pulau layak anak pertama kali dideklarasikan di Indonesia oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pulau Hiri pada tahun 2018. Hal ini didasarkan pada

kondisi alam pulau Hiri yang masih asri dan keseriusan pemerintah dan masyarakat setempat yang serius dalam mewujudkan pulau layak anak. Menurut Muhadjir (2000:15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat Kecamatan maupun kelurahan, kebijakan tentang program layak anak sudah dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Namun belum disosialisasikan di tingkat kecamatan Pulau Hiri. Proses penyusunan kebijakan dan anggaran sudah melibatkan pendapat/partisipasi anak. Jadi pada dasarnya tingkat kecamatan mengetahui tentang program pulau layak anak berdasarkan instruksi dari atasan hanya saja kebijakan dalam bentuk dokumen belum disosialisasikan di tingkat kecamatan ke bawah sehingga meskipun belum memiliki dokumen kebijakan tetapi untuk beberapa kegiatannya sudah mengarah ke perlindungan anak. Dalam hal padukuhan/dusun/RT/RW ramah anak di tingkat kecamatan berdasarkan informasinya belum dilakukan. Kecamatan maupun kelurahan perlu untuk lebih aktif lagi memanfaatkan program pulau layak ini sampai di tingkat RT/RW ramah anak agar pemantauan terhadap anak dapat dilihat dari bawah ke atas. Sehingga program ini menjadi lebih bersinergi. Hal yang sama juga terjadi di tingkat PAUD di Pulau Hiri. Proses penyusunan kebijakan dan anggaran di sekolah sudah melibatkan pendapat/partisipasi anak, namun belum ada proses-proses selanjutnya terkait dengan program-program pengembangan menyangkut dengan program layak anak di Pulau Hiri yang melibatkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelibatan pendapat/partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan merupakan suatu hal yang wajib, mengingat aspirasi yang disampaikan oleh anak merupakan usulan murni yang berasal dari anak-anak di lingkungannya (Larasati, Nurhadi: 2019). Partisipasi anak seyogyanya adalah bagian dari kebijakan pulau layak anak, kebijakan anak dimaksudkan untuk mewujudkan system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam merencanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan disebutkan dalam bab 2 Hak anak untuk berpartisipasi bisa dijabarkan ke dalam beberapa hak seperti hak berekspresi, berorganisasi, akses atas informasi, dukungan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan serta hak untuk bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Sedangkan pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan bahwa partisipasi anak sebagai hak dimana anak berhak untuk didengarkan pandangannya, partisipasi anak sebagai prinsip sebagaimana telah ditetapkan sebagai satu dari empat prinsip dasar KHA, partisipasi anak merupakan sebuah metode yakni sarana bagi anak untuk melakukan advokasi bagi dirinya sendiri dan membantu mengubah keadaan mereka sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kepentingan anak.

## **Input**

Berdasarkan Permen PPPA Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 “dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kota layak anak, pemerintah provinsi memfasilitasi

terbentuknya Gugus Tugas pengembangan kota layak anak tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota". Namun di Pulau Hiri, Gugus tugas program pulau layak anak memang ada, hanya saja belum melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dari gugus tugas tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam program layak masih perlu dikembangkan karena sampai saat ini masyarakat perlu untuk mendapatkan pendampingan terkait dengan program ini, sedangkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak pernah dilakukan oleh LSM Daurmala yaitu salah satu lembaga yang menangani tentang perempuan dan anak namun program ini telah berakhir di tahun 2019 sehingga data yang diperoleh adalah tingkat pernikahan dini semakin meningkat di Pulau Hiri.

Menurut informasi selanjutnya perpustakaan di setiap kelurahan/media informasi/ sistem informasi pulau layak anak yang menyediakan informasi layak anak belum ada sehingga perlu untuk diseriisi keberadaan perpustakaan ini. Perpustakaan di setiap kelurahan dapat membantu anak dalam meningkatkan kemampuan membaca dan mempertajam kemampuan kognitif anak sehingga ini akan berdampak pada peningkatan sumber daya anak dalam program pulau layak anak di pulau Hiri. Berdasarkan informasi dari lurah, Gugus tugas program pulau layak anak memang ada, hanya saja belum melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dari gugus tugas tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam program layak masih perlu dikembangkan karena sampai saat ini masyarakat perlu untuk mendapatkan pendampingan terkait dengan program ini, sedangkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak pernah dilakukan oleh LSM Daurmala yaitu salah satu lembaga yang menangani tentang perempuan dan anak namun program ini telah berakhir di tahun 2019 sehingga data yang diperoleh adalah tingkat pernikahan dini semakin meningkat di Pulau Hiri.

Perpustakaan di setiap kelurahan/media informasi/ system informasi pulau layak anak yang menyediakan informasi layak anak belum ada sehingga perlu untuk diseriisi keberadaan perpustakaan ini. Perpustakaan di setiap kelurahan dapat membantu anak dalam meningkatkan kemampuan membaca dan mempertajam kemampuan kognitif anak sehingga ini akan berdampak pada peningkatan sumber daya anak dalam program pulau layak anak di pulau Hiri. Sarana prasarana atau fasilitas infrastruktur ramah anak memiliki peran dalam mendukung terciptanya pulau layak anak. Fasilitas secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau alat yang dapat mempermudah pekerjaan (Annisa & Alhadi, 2019). Prinsip kebijakan berwisata ke pulau hiri layak anak adalah menyediakan infrastruktur yang mengakomodir kepentingan anak yaitu jalan ramah anak, transportasi ramah anak, ruang public atau ruang bermain, sanitasi, air bersih, telekomunikasi serta memacu kreativitas anak dibidang pariwisata (Peraturan Walikota Ternate, 2018).

Data pendukung dari pangkalan Dapodik Lembaga PAUD yang ada di Pulau Hiri untuk PAUD Pembina 10 sudah terakreditasi B dan PAUD Gurabala dan PAUD Flamboyan baru terakreditasi dengan nilai C. Setelah ditelusuri lebih lanjut rata-rata guru PAUD di Pulau Hiri ada yang sarjana tetapi tidak linear dengan pendidikan anak usia dini. Sedangkan berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan petugas puskesmas, puskesmas Faudu telah memiliki beberapa dokter spesialis diantaranya adalah dokter umum dan dokter gigi. Hal ini tentu sangat

bermanfaat untuk masyarakat pulau Hiri dalam hal pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya anak. Berkaitan dengan Sumber daya manusia, menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun menjawab tantangan masa depan, Pegawai/Aparatur harus memiliki kinerja yang handal, dan profesional. Hal ini untuk merespon arus globalisasi maupun nasional yang mengharuskan aparatur meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Selain itu pengaruh perubahan internal maupun eksternal yang terjadi menuntut organisasi untuk membuka diri terhadap tuntutan perubahan dan berupaya menyusun kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan dan bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Hal ini organisasi mampu menyusun strategi dan kebijakan yang ampuh untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi (Suryani, Agustin, Alamsyah: 2017).

### **Proses**

Kecamatan Pulau Hiri dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembangunan telah melibatkan dan mendengarkan suara dan aspirasi anak. Hal ini tentu sudah sangat bagus dalam program pulau layak anak di pulau Hiri. Namun dibutuhkan pendampingan lebih lanjut agar semua perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Masih banyak sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang perlu dilakukan untuk mengadakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pulau layak anak. sarana dan prasarana yang dimaksud adalah perpustakaan di setiap kelurahan, akses rute yang aman ke sekolah agar ditingkatkan lagi, ruang laksasi di setiap kantor, ruang bebas asap rokok di setiap fasilitas umum, ruang/taman bermain ramah anak.



**Gambar 2. Puskesmas Hiri**



**Gambar 3. Rute Jalan ke Sekolah**



**Gambar 4. Pelabuhan Hiri**

Selama ini evaluasi belum pernah dilakukan di tingkat kecamatan karena belum memegang dokumen kebijakan tentang pulau layak anak itu sendiri. Enam kelurahan dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembangunan telah melibatkan dan mendengarkan suara dan aspirasi anak. Hal ini tentu sudah sangat bagus dalam program pulau layak anak di pulau Hiri. Namun dibutuhkan pendampingan lebih lanjut agar semua perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Sejauh dilakukannya pengamatan oleh tim peneliti, masih banyak sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang perlu dilakukan untuk mengadakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pulau layak anak. sarana dan prasarana yang dimaksud adalah perpustakaan di setiap kelurahan, akses rute yang

aman ke sekolah agar ditingkatkan lagi, ruang laksasi di setiap kantor, ruang bebas asap rokok di setiap fasilitas umum, ruang/taman bermain ramah anak. Evaluasi belum pernah dilakukan di tingkat kelurahan karena belum memegang dokumen kebijakan tentang pulau layak anak itu sendiri. Kemudian dari segi pembiayaan juga tidak ada sama sekali. Tiga PAUD yang ada di pulau Hiri dalam melakukan perencanaan kegiatan telah melibatkan dan mendengarkan suara dan aspirasi anak. Hal ini tentu sudah sangat bagus dalam program pulau layak anak di pulau Hiri. Namun dibutuhkan pendampingan lebih lanjut agar semua perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Sejauh dilakukannya pengamatan oleh tim peneliti, masih banyak sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang perlu dilakukan untuk mengadakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pulau layak anak. sarana dan prasarana yang dimaksud adalah perpustakaan di setiap kelurahan, akses rute yang aman ke sekolah agar ditingkatkan lagi, ruang laksasi di setiap sekolah, ruang bebas asap rokok di setiap fasilitas sekolah, ruang/taman bermain ramah anak. Selama ini evaluasi belum pernah dilakukan di tingkat sekolah terkait dengan program pulau layak anak karena belum memegang dokumen kebijakan tentang pulau layak anak itu sendiri. Kemudian dari segi pembiayaan juga tidak ada sama sekali. Puskesmas Faudu dalam melakukan perencanaan kegiatan telah melibatkan dan mendengarkan suara dan aspirasi anak. Hal ini tentu sudah sangat bagus dalam program pulau layak anak di pulau Hiri. Namun dibutuhkan pendampingan lebih lanjut agar semua perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di bidang kesehatan yang perlu dilakukan untuk mengadakan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pulau layak anak. sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ruang laksasi di setiap sekolah, ruang bebas asap rokok di setiap fasilitas sekolah. Selama ini evaluasi belum pernah dilakukan di tingkat puskesmas terkait dengan program pulau layak anak karena belum memegang dokumen kebijakan tentang pulau layak anak itu sendiri. Kemudian dari segi pembiayaan itu ada karena beberapa program puskesmas sangat berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak.

Setelah ditetapkan Pulau Hiri sebagai pulau layak anak, pemerintah dan masyarakat wajib untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap jalannya program-program pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dalam pemenuhan pulau layak anak. Masyarakat dan seluruh stakeholder harus ikut bersama dalam melakukan evaluasi baik itu terhadap kebijakan maupun proses yang telah berjalan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada konstituen, untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan serta melihat sejauh mana tujuan telah dicapai (Liwananda, 2020).

### **Produk**

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat, belum ada anak yang mendapatkan prestasi di Pulau Hiri. Sehingga disarankan kepada berbagai pihak agar dapat membantu Pulau Hiri dalam mencetak generasi-generasi emasnya. Mengingat masih banyak factor pendukung dalam program pulau layak anak ini seperti dukungan dari pemerintah yakni dinas pemberdayaan



perempuan dan perlindungan anak, letak dan geografis pulau Hiri, masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat seperti Daurmala dan Wahana Visi Indonesia.

Adapun yang menjadi penghambat dari program pulau layak anak di Pulau Hiri ini adalah kurangnya sosialisasi dan pendekatan serta kurangnya mitra atau kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang berbagai kegiatan pulau layak anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan camat, belum ada anak yang mendapatkan prestasi di Pulau Hiri. Sehingga disarankan kepada berbagai pihak agar dapat membantu Pulau Hiri dalam mencetak generasi-generasi emasnya. Mengingat masih banyak factor pendukung dalam program pulau layak anak ini seperti dukungan dari pemerintah yakni dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, letak dan geografis pulau Hiri, masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat seperti Daurmala dan Wahana Visi Indonesia. Penghambat lain dari program pulau layak anak di Pulau Hiri ini adalah kurangnya sosialisasi dan pendekatan serta kurangnya mitra atau kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang berbagai kegiatan pulau layak anak. Kelurahan perlu untuk memberdayakan RT/RW agar pemantauan bisa dilakukan dengan kluster yang lebih kecil lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, belum ada anak yang mendapatkan prestasi di Pulau Hiri. Sehingga disarankan kepada berbagai pihak agar dapat membantu Pulau Hiri dalam mencetak generasi-generasi emasnya. Mengingat masih banyak factor pendukung dalam program pulau layak anak ini seperti dukungan dari pemerintah yakni dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, letak dan geografis pulau Hiri, masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat seperti Daurmala dan Wahana Visi Indonesia.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka anak perlu distimulasi pada segala aspek perkembangan anak, anak perlu mendapatkan rasa aman dan nyaman, memperoleh hak-haknya, dilindungi dan disejahterakan. Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan menyatu dengan adat istiadat, Marsaid (2015:56-58) menjelaskan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Sedangkan tanda-tanda secara fisik yang menunjukkan kedewasaan seseorang adalah dengan munculnya kondisi-kondisi secara biologis seperti pada perempuan adalah tumbuh payudara, menstruasi, dan lain-lain. Pada laki-laki, tingkat kedewasaan secara fisik ditandai dengan tumbuhnya jakun, kumis, jenggot dan lain sebagainya. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Sebelum 18 tahun, anak perlu untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Karena tentu saja, banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi sebelum ia dinyatakan dewasa baik secara fisik, psikis maupun berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut lagi, anak merupakan makhluk yang sangat rentan di dalam proses tumbuh kembangnya yang memungkinkan anak tersebut memerlukan kasih sayang dan perhatian yang

lebih (Siburian, 2021:1). Pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang dimaksud adalah memberikan stimulasi dan rangsangan yang tepat pada anak melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah dan lain-lain. Dengan pemberian stimulasi yang tepat maka anak akan tumbuh sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa. Menurut Siswina (2016:29) stimulasi harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan kegembiraan antara guru dan anak. Stimulasi dapat dilakukan baik di rumah (orangtua terhadap anak) dan di sekolah (guru dan anak). Dengan adanya stimulasi yang tepat dan didukung oleh pemerintah setempat terkait dengan sarana prasarana yang ramah anak maka tentu saja anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan bangsa.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyusunan kebijakan dan anggaran yang sudah melibatkan anak agar perlu disosialisasikan lagi ke seluruh masyarakat yang ada di Pulau Hiri, 2). Pemenuhan dan hak perlindungan anak agar ditingkatkan lagi dengan melibatkan berbagai LSM ataupun mitra lainnya, 3). Perencanaan kegiatan dan pembangunan yang telah melibatkan suara dan aspirasi anak agar dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama-sama agar seluruh sarana dan prasarana sesuai dengan program pulau layak anak, 4). Para Pendidik, orang tua, dan seluruh stakeholder agar bersama-sama mencetak generasi-generasi emas yang ada di Pulau Hiri.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi terkait dengan program pulau layak anak, diantaranya Camat Pulau Hiri beserta para staffnya, lurah-lurah di kecamatan pulau Hiri, Kepala PAUD di Pulau Hiri, Kepala Puskesmas di Pulau Hiri, Kepala Dinas DPPP Kota Ternate, Masyarakat Pulau Hiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa, Nurul & Alhadi Zikri. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak dalam penyediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 2 Nomor 1 Maret 2019.
- Larasati, P. & Nurhadi. 2019. Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Forum Anak Kota Magelang. *Perpustakaan UGM: Jurnal Online*
- Badan Pusat Statistik Kota Ternate. Kecamatan Pulau Hiri dalam Angka 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018. Press Release Pulau Hiri Pionir Menuju Pulau Layak Anak. Siaran Pers Nomor: B-147/Set/Rokum/MP 01/08/2018
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

- Kompas.com. 2018. Pulau Hiri di Ternate dideklarasikan sebagai Pulau Layak Anak
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010. *Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi*.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2015 *tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan*.
- Peraturan Walikota Ternate Nomor 25 Tahun 2018 *tentang Blue Print Berwisata ke Pulau Hiri Layak Anak*.
- Rosalin, dkk. 2016. *Kabupaten/Kota Layak Anak. Bahan Advokasi Kebijakan KLA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Siburian, Supriano. 2021. *Kerentanan Anak Terhadap Kekerasan yang Berdampak Kenakalan Bersifat Pidana*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Siswina, Tessa., Shahib, Nurhalim, M., Rasyad, S. Adjat. 2016. *Pengaruh Stimulasi Pendidikan Terhadap Perkembangan Kecerdasan Anak Usia 3-6 Tahun*. Jurnal Ilmiah Bidan.
- Suryani, Erni. Agusdin. & Alamsyah. 2017. *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kota Mataram dalam Mewujudkan Kota Mataram sebagai Kota Layak Anak*. Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram. Volumen 6 Nomor 2 Tahun 2017.
- Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Tahun 2003)
- Undang-Undang No.17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Liwananda M TegarTomi. 2020. *Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang*.